

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR SUB
KOMPONEN C
DI KOTA SEMARANG
(PROGRAM PERBAIKAN SISTEM DRAINASE KALI SEMARANG)**

Oleh:

Yudha Bhakti Persada, Aloysius Rengga, Maesaroh *)

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Profesor Haji Soedarto Sarjana Hukum, Tembalang, Semarang 12693

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The high level of development in Semarang city can be likened as a double-edge knife. In one side, it has positive impacts, but in the other side it said the opposite. It can be negative for its environment. One of the problems which appeared is floods disaster which often hit in Semarang. The impact of floods can ruin the people activities. One of efforts that Semarang city Government (Pemerintah Kota Semarang) can do is the flood control program through improved drainage Kali Semarang. This program implemented since 2010 and estimated completion in 2015.

This research implemented in Dinas PSDA and ESDM Semarang city as a responsible person from the Semarang city Government party. Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PPLP) of Central Java Province officer as a responsible person also from Central Java Province and kelurahan Bandarharjo which passed by Kali Semarang. This research is based on the failure of the flood control indicator in the evaluation of RPKD 2014 period about flood control. The aims of this research are to describe The Implementation of Flood Control Program Sub-Component C in Semarang City (Improvement Drainage System Kali Semarang) also describe the driving factor and inhibiting execution in the Implementation Program of Flood Control Sub-Component C in Semarang (Improvement Drainage System Kali Semarang).

The result showed that in the implementation there are many cases which can obstruct program implementation. This case is caused by human resources factors, the implementation team of yet understood of the standard and target of the implementation program, and few of community's participation which caused by social and economic condition. The recommendations which appropriate are socialization about standard and target to entire of the implementation program, the staffing should be appropriate according to the competence, and the community empowerment of disaster area to increase community participation.

Keywords : Drainage, Implementation, Flood Control Program

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Semarang merupakan pusat pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi di Jawa Tengah. Berbagai instansi publik setingkat provinsi dan DPRD Provinsi terpusat di Kota Semarang. Selain itu berbagai perkantoran swasta juga terpusat di Kota Semarang. Berperan sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi di Jawa Tengah, tingkat pembangunan kawasan industri, ekonomi, hingga pemukiman penduduk di Kota Semarang sangat tinggi.

Tingkat pembangunan yang tinggi di Kota Semarang diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi pembangunan berdampak positif, dan di sisi lain berdampak buruk bagi lingkungan. Dampak positifnya adalah semakin banyak dibangun daerah industri maupun berbagai tempat yang menghasilkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dampak negatifnya mengakibatkan Kota Semarang rawan terjadi banjir.

Lebih dari 50% wilayah Kota Semarang adalah kawasan rawan banjir. Dari 16 kecamatan yang ada di Semarang 11 diantaranya dinyatakan sebagai daerah rawan

banjir. Wilayah tersebut adalah Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Timur, Gayamsari, Genuk, Pedurungan, Gajah Mungkur, Candisari dan Gunungpati.

Banjir merupakan masalah pokok Kota Semarang yang harus segera ditemukan jalan keluarnya. Pada tahun 2010 Pemerintah Kota Semarang merencanakan program Pengendalian Banjir Kota Semarang. Program ini tertuang dalam Peraturan Daerah No.12 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015. Sebagai upaya untuk mencapai tata ruang wilayah dan infrastruktur berkelanjutan, dalam hal ini yang berkaitan dengan banjir, sesuai RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 Pemerintah Daerah Kota Semarang lebih menekankan pada perbaikan atau peningkatan kualitas sistem drainase di Kota Semarang. Sistem drainase dikembangkan berdasarkan konsep *one watershed one plan one management*. Masing-masing sistem drainase dibagi menjadi menjadi daerah hulu dan hilir. Salah satu program pengendalian banjir adalah perbaikan sistem drainase Kali Semarang. Detail program perbaikan sistem drainase kali Semarang ini

meliputi: Pembangunan pompa pada sistem Pintu Air sebagai pengendali air, *Revetment corrugated concrete sheet pile* di kedua sisi sepanjang Kali Semarang. *Revetment* ini merupakan dinding sungai yang berguna untuk melindungi sungai dari erosi, normalisasi dasar Kali Semarang dan membuat jalan inspeksi di tanggul kanan dan kiri Kali Semarang.

Program Perbaikan Kali Semarang ini dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral (PSDA ESDM) Kota Semarang dan Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah. Perbaikan Drainase Kali Semarang merupakan penerapan pelaksanaan sistem drainase perkotaan. Regulasi yang mendasari dari dilaksanakannya program ini adalah dengan adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Drainase Perkotaan. Permen tersebut mewajibkan seluruh kota metropolitan di Indonesia untuk menerapkan sistem drainase perkotaan dalam mencegah banjir. Pada pelaksanaannya sistem drainase perkotaan yang telah disusun yaitu yang Perbaikan Sistem Drainase Kali Semarang belum ada payung hukum yang melandasi. Padahal pada Pasal 35 Permen Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Drainase Perkotaan mengharuskan pemerintah kota menyusun peraturan daerah sebagai landasan pelaksanaan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan. Hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi proses

implementasi program karena tidak adanya payung hukum yang mengatur dengan jelas.

Melihat dan mencermati permasalahan diatas, maka minat dan perhatian peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Implementasi Program Pengendalian Banjir Sub Komponen C di Kota Semarang (Program Perbaikan Sistem Drainase Kali Semarang)”

B. Tujuan Penelitian

- 1) Mendeskripsikan Implementasi Program Pengendalian Banjir Sub Komponen C di Kota Semarang (Perbaikan Sistem Drainase Kali Semarang).
- 2) Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Pengendalian Banjir Sub Komponen C di Kota Semarang (Perbaikan Sistem Drainase Kali Semarang)

C. Teori

1. Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan menurut Harold C Laswell dan Abraham Kaplan dalam Islamy (2004: 13-14), kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek yang terarah. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan dan tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pembuat keputusan yang kemudian dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik. Kebijakan publik meliputi

seluruh proses dari formulasi kebijakan, implementasi kebijakan serta evaluasi kebijakan.

2. Implementasi Kebijakan

Prinsip dasar implementasi kebijakan yang efektif (Nugroho, 2011: 650-652)

1. Ketepatan kebijakan
Ketepatan kebijakan disini adalah hal-hal mengenai kesesuaian kebijakan yang telah dirumuskan dengan karakter masalah yang akan dipecahkan. Kemudian sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal untuk memecahkan masalah yang akan dipecahkan.
2. Ketepatan pelaksana
Ketepatan pelaksana berkaitan dengan berapa dan siapa saja pihak-pihak yang dipilih untuk melaksanakan sebuah kebijakan/program serta keterlibatan pihak swasta dan masyarakat.
3. Ketepatan target
Ketepatan target berkaitan dengan dimana kebijakan tersebut akan dilaksanakan. Dalam hal ini yang termasuk di dalamnya adalah lingkungan sekitar lokasi yang menjadi target kebijakan serta masyarakat di lokasi tersebut.
4. Ketepatan lingkungan kebijakan
Ada dua lingkungan yang paling menentukan keberhasilan suatu kebijakan maupun program, yang pertama yaitu lingkungan kebijakan, yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Yang kedua yaitu lingkungan eksternal

kebijakan, yang terdiri dari *public opinion* yaitu persepsi public akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive* institutions yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat seperti media masa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, serta *individuals* yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

5. Ketepatan proses
Ketepatan proses disini secara garis besar melihat bagaimana para pelaksana kebijakan dalam menjalankan suatu program maupun kebijakan dilihat dari apakah mereka telah memahami, menerima, dan siap untuk menjadi bagian dari kebijakan bagi masyarakat target kebijakan dan siap menjadi pelaksana kebijakan bagi pemerintah.

Implementasi adalah tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Indiahono (2009:38-39) ada beberapa variabel yang mempengaruhi implementasi yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, disposisi atau sikap pelaksana

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang dan Satker PPLP Provinsi Jawa Tengah. Jenis data yang digunakan adalah data yang berbentuk tulisan dan data berbentuk kata-kata. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari wawancara terhadap informan dan sumber data sekunder yang berasal dari dokumen, buku, data statistik, laporan, dan lain-lain. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Kualitas data dilakukan dengan uji kredibilitas. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis teknik *komponensial* dan diinterpretasi melalui reduksi data yang diperoleh, kemudian data dipilah, dan disajikan yang pada akhirnya ditarik kesimpulan atas jawaban-jawaban yang diperoleh dari informan.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Program Perbaikan Drainase Kali Semarang sebagai bagian dari Kebijakan Pengendalian Banjir Kota Semarang

Secara umum penyebab utama banjir di Indonesia adalah perubahan dan perilaku manusia dalam mengubah fungsi lingkungan. Pesatnya pertumbuhan permukiman dan industri telah mengubah keseimbangan fungsi lingkungan, bahkan kawasan retensi banjir yang disediakan alam berupa danau mauun

rawa juga telah berubah fungsinya. Keadaan ini secara signifikan menurunkan kapasitas penyerapan air secara drastis. Selain itu, lemahnya penegakan hukum ikut mendorong tumbuh dan berkembangnya permukiman ilegal di bantaran sungai, bahkan masuk ke badan sungai. Keadaan ini makin memperburuk sistem tata air lingkungan, karena kapasitas tampung dan pengaliran sungai menurun dan terjadilah luapan air.

Sebelum membuat suatu kebijakan, pembuat kebijakan harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik permasalahan yang ada, sehingga dapat dicari tindakan alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Setelah permasalahan diketahui maka tujuan dari program haruslah sesuai untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat. Dilihat dari tujuan program secara keseluruhan, tujuan program telah meliputi seluruh permasalahan yang ada pada masyarakat.

Salah satu penentu keberhasilan implementasi program dipengaruhi oleh aktor utama yang berperan dalam implementasi program. Selain itu juga diperlukan peran serta dari pihak swasta dan juga masyarakat. Pada paradigma *good governance* dijelaskan bahwa pemerintah perlu melibatkan peran swasta dan masyarakat dalam pemerintahannya. Dari hasil penelitian lapangan dapat diketahui bahwa program perbaikan Kali Semarang sebagai bentuk Pengendalian Banjir Komponen C di Kota Semarang dilaksanakan oleh Satker PPLP Jawa Tengah dibantu

oleh Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang.

Perencanaan matang yang telah disusun pada Tahun 2000 telah terlaksana dengan lancar dan diharapkan pada Tahun 2015 semua pekerjaan telah selesai. Menanggapi program tersebut telah dibentuk Satker dari Direktorat Jenderal Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman. Pendanaan berasal dari Jepang dimasukkan pada APBN yang kemudian disalurkan pada Satker PPLP Jawa Tengah dibantu dengan Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang. Mengenai pembebasan lahan, komponen A, B, dan C dana yang digunakan 50% menjadi tanggung jawab dari pusat, 25% dari provinsi Jawa Tengah, dan 25% dari Kota Semarang.

Sebagai target atau pihak yang bersinggungan langsung dengan program, masyarakat perlu mengerti dan ikut serta dalam program pemerintah. Program tidak akan berjalan lancar apabila mendapatkan tentangan dari pihak masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang bersentuhan langsung. Berdasarkan penelitian lapangan, peneliti menemukan bahwa kondisi sebagian masyarakat masih belum menerima dan memprotes adanya program tersebut.

Peran elemen masyarakatlah yang belum terlihat dalam seluruh program pengendalian banjir di Kota Semarang. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan dan pemeliharaan program. Proyek fisik seperti normalisasi memerlukan dukungan dari kelompok masyarakat maupun LSM dalam melakukan

kampanye hidup bersih dan perlindungan sungai.

Upaya penanggulangan banjir tidak terlepas dari peran stakeholder dalam setiap kegiatan. Dari hasil penelitian lapangan diketahui bahwa secara umum peran stakeholder, terutama penerima dampak atau masyarakat, masih terbatas dan peran pemerintah masih sangat dominan. Pada tahap pencegahan banjir, partisipasi masyarakat berupa keikutsertaan mereka dalam berbagai kegiatan, seperti sosialisasi berbagai peraturan, membangun atau membersihkan saluran drainase lingkungan secara swadaya, memprakarsai lomba kebersihan, menjaga dan memantau kondisi lingkungan. Hal ini diperjelas dengan aspirasi masyarakat yang belum dikelola dalam bentuk kelompok/organisasi kemasyarakatan, namun hanya memanfaatkan kelembagaan RT/RW.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Perbaikan Drainase Kali Semarang sebagai bagian dari Kebijakan Pengendalian Banjir Kota Semarang

1) Kejelasan standar dan sasaran program

Perbaikan Kali Semarang merupakan salah satu upaya pra banjir. Program perbaikan Kali Semarang melalui pengendalian teknis yaitu suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk menjamin suatu hasil pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan

di dalam dokumen kontrak. Atau dalam artian, program ini harus disesuaikan dengan standar program yang ada. Kepuasan suatu hasil pekerjaan untuk selanjutnya diwujudkan dalam bentuk diterbitkan Sertifikat Serah Terima Pertama (PHO) dan Serah Terima Terakhir (FHO).

Berdasarkan penelitian lapangan staf pelaksana banyak yang belum mengetahui SOP yang mendasari program, namun yang berlaku pada Dinas pelaksana mengacu pada:

1. Dokumen Kontrak Pekerjaan
 2. Engineering
 3. Manajemen Pelaksanaan Pekerjaan
- 2) Ketersediaan sumber daya untuk mendukung program

Implementasi suatu program atau kebijakan tentu memerlukan sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Kemampuan, kapasitas dan kompetensi pelaksana program mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dimilikinya. Permasalahan yang terjadi dengan pegawai yang tidak memiliki latar belakang ilmu pengetahuan sesuai tugas dan fungsi yang mereka miliki merupakan masalah yang biasa terjadi dalam birokrasi di Indonesia. Hal ini pula yang terjadi pada implementasi program perbaikan Kali Semarang, Pihak Dinas PSDA dan ESDM berpendapat bahwa untuk pengawas proyek di lapangan tidak menguasai K3. Dimana dalam sebuah proyek pembangunan harus selalu menaati K3 guna menjaga keselamatan para pekerja lapangan.

Sumber daya finansial merupakan sumber daya lain yang juga penting dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Berdasarkan anggaran dana yang telah disusun, belum ada biaya untuk pengelolaan maupun evaluasi berkala yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang. Hal inilah yang sering terjadi dalam suatu program fisik di Indonesia. Pembangunan yang tidak dilandasi dengan evaluasi berkala akan mengakibatkan daya tahan suatu proyek pembangunan tidak akan berlangsung lama sesuai rencana.

- 3) Efektivitas Komunikasi Antar Badan Pelaksana dan Masyarakat

Program Perbaikan Kali Semarang dapat dilaksanakan secara efektif jika informasi yang disampaikan oleh aktor pelaksana dapat disampaikan dan ditanggapi dengan baik oleh aktor pelaksana lainnya dan masyarakat.

Berdasarkan temuan di lapangan, petugas pelaksana dari Dinas PSDA dan ESDM maupun Satker PPLP Provinsi Jawa Tengah menggunakan media lisan. Oleh karena itu, media yang digunakan oleh Dinas PSDA dan ESDM berbentuk sosialisasi maupun seminar terhadap Kecamatan dan Kelurahan di wilayah program. Namun kelemahan dari seminar tadi adalah yang diberikan seminar hanya perangkat Kecamatan saja, itu saja hanya perwakilan. Sedangkan dari pihak Kecamatan belum tentu langsung disampaikan ke masyarakat. Menurut para informan, media tersebut sudah efektif

digunakan untuk saat ini karena merupakan cara yang sederhana yang dapat dipahami oleh masyarakat.

Namun media berupa seminar tersebut memiliki kelemahan karena masyarakat tidak diikutsertakan. Berdasarkan wawancara terhadap masyarakat di wilayah Bandarharjo sebagai warga wilayah muara air sungai, masyarakat tidak mengetahui adanya sosialisasi mengenai program perbaikan Kali Semarang sebagai upaya pengendalian banjir, masyarakat mengetahui pelaksanaan program pada saat pelaksanaan telah dimulai.

Pada program perbaikan Kali Semarang ini koordinasi yang dilakukan adalah melalui FGD (Focus Group Discussion) dimana di dalam FGD Satker PPLP Jawa Tengah dan Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang melibatkan Bappeda Kota Semarang, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dan juga kontraktor penyedia jasa. Koordinasi sebagai bentuk komunikasi ini meliputi pada tahapan perencanaan sebagai pemilihan alternatif kebijakan, dan juga pada tahapan evaluasi program berjalan dan program selesai.

4) Karakteristik Badan Pelaksana Program

Program pengendalian banjir di Kota Semarang merupakan sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan banjir di Kota Semarang. Oleh karena program ini dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah maka diperlukan adanya badan pelaksana untuk mendukung efektivitas pelaksanaan Program

Pada penelitian ini Badan Pelaksana yang dijadikan subjek penelitian adalah pegawai Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang dan Satker PPLP Provinsi Jawa Tengah.

Dalam temuan di lapangan, di dapatkan bahwa Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang memiliki tugas pokok dan fungsi secara jelas dalam Program Pengendalian Banjir sesuai Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Semarang. Satker PPLP Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu satker dari Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah juga memiliki tugas pokok serta fungsi penyusunan dan penanganan drainase.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa pendelegasian dilakukan secara resmi.

Mengenai budaya yang berkembang dalam Badan Pelaksana, kedua badan ini memang berkompeten dalam melaksanakan program. Hal ini dibuktikan dengan adanya zero accident dalam kurun waktu 865.574 jam kerja. Satker PPLP Jawa Tengah dan Dinas PSDA dan ESDM sangat memperhatikan keselamatan kerja dan terlaksananya program sesuai dengan apa yang direncanakan.

5) Disposisi atau Sikap Pelaksana

Efektivitas dalam melaksanakan Program Perbaikan Kali Semarang akan lebih mudah tercapai apabila implementor menunjukkan sikap yang baik dengan menjalankan kebijakan seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, komitmen yang dimiliki oleh pegawai Satker PPLP Jawa Tengah dan Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang sudah cukup bagus dimana pegawai tersebut secara serius mengikuti segala kegiatan dan terjun ke lapangan untuk mengawasi proyek. Hal ini juga harus didukung dengan intensitas pelaksanaan dan loyalitas implementor dalam melaksanakan program. Pelaksana program yang memiliki intensitas pelaksanaan dan loyalitas yang tinggi akan menunjukkan sikap yang cenderung secara aktif dan sering terlibat dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, pegawai Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang maupun Satker PPLP Jawa Tengah yang menjadi pelaksana lapangan memiliki intensitas pelaksanaan dan loyalitas yang tinggi dalam melaksanakan program ini. Hal ini dikarenakan pegawai yang berkaitan dengan program akan terjun ke lapangan untuk mengawasi minimal 4 hingga 5 kali dalam seminggu. Untuk hasil temuan di lapangan, keterlibatan pelaksana hanya terputus dalam kontrak kerja penyediaan barang/jasa yang dalam pelaksanaannya pihak ketiga lah yang melaksanakan pembangunan. Sementara pelaksana program hanya sebagai pengawas dan evaluasi. Pada tahap akhir dimana pihak ketiga atau swasta yang melaksanakan proyek, hal inilah yang menjadi suatu hal yang perlu diawasi secara lebih dalam. Pengadaan barang atau jasa di Indonesia sendiri merupakan salah satu sektor dimana di dalamnya terdapat banyak penyalahgunaan dana dan pada pelaksanaannya

program dilaksanakan secara asal-asalan. Pada program perbaikan Kali Semarang ini, pembangunan telah selesai dan pada kenyataannya tidak ditemukan adanya penyalahgunaan dana maupun tindak KKN di dalam pengadaan jasa.

6) Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Implementasi suatu program sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Baik lingkungan dalam target maupun lingkungan global terkait aktor pelaksana program.

Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 mengenai Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, dalam penyelenggaraan sistem drainase perlu memperhatikan kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat. Pada penelitian di lapangan, sebagian warga di wilayah Kali Semarang bagian utara berbeda dengan daerah tengah. Di bagian utara atau di Kecamatan Bandarharjo masyarakat masih dalam kondisi ekonomi tertinggal

Hal inilah yang sebenarnya menjadi perhatian pemerintah Kota Semarang maupun Provinsi dalam memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah bencana. Salah satu program pemerintah yang dikhususkan kepada masyarakat yang rentan terhadap bencana adalah PNPM-Daerah Tertinggal dan Khusus. Program ini diberikan pada daerah-daerah tertinggal dan yang mengalami konflik sosial dan bencana alam. Tujuannya untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mempercepat pemulihan dan

pertumbuhan sosial ekonomi daerah-daerah tertinggal dan khusus. Di samping itu, untuk memulihkan kondisi ekonomi masyarakat dapat juga memanfaatkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Melalui program PNPM Mandiri masyarakat dapat menentukan sendiri tentang kegiatan apa yang akan dilakukan. Sedangkan melalui Program KUR masyarakat dapat merintis atau membangun kembali usaha sehingga dapat segera bangkit dari bencana.

Dengan adanya beragam program tersebut diharapkan memberikan rasa optimisme masyarakat yang rawan bencana. Bagi masyarakat yang sebelumnya menekuni bidang wirausaha bisa tetap optimis membangunnya kembali karena pemerintah telah memberikan kemudahan pinjaman melalui program KUR. Sedangkan bagi yang kehilangan pekerjaan dapat diatasi dengan adanya program pembangunan infrastruktur atau yang bersifat padat karya guna membuka kesempatan kerja. Namun kenyataan dukungan pemerintah dalam memajukan kondisi ekonomi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana sangat rendah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Program Perbaikan Drainase Kali Semarang sebagai bagian dari Kebijakan Pengendalian Banjir Kota Semarang

Program Perbaikan Kali Semarang merupakan program yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan banjir di Kota Semarang melalui perbaikan Kali Semarang. Program Perbaikan Kali Semarang ini meliputi kegiatan Pembangunan Pompa Drainase, Pintu Air, Sarangan Sampah (*Trash Rack*) dan Kolam Retensi *Revetment corrugated concrete sheet pile*, normalisasi Kali Semarang, pembuatan *Box Culvert*, pembuatan Groundsil Kali Semarang. Program ini menjadi tanggung jawab Satker PPLP Provinsi Jawa Tengah dan Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang. Satker PPLP Provinsi Jawa Tengah mengurus segala hal mengenai pengadaan barang dan jasa dengan pihak Kontraktor yaitu Adhi Karya, Waskita Karya, Brantas Abipraya dan Grundfos. Sedangkan pihak PSDA dan ESDM mengurus segala hal terkait pembebasan lahan dan sosialisasi program.

Program perbaikan drainase Kali Semarang ini menjadi salah satu program pengendalian banjir di Kota Semarang. Program ini telah dilaksanakan pada tahun 2010 namun pada kenyataannya berdasarkan hasil RKPD pencapaian masih belum mencapai target. Hal ini dikarenakan masih lemahnya aturan mengenai pembatasan pembangunan pemukiman di Kota Semarang yang seharusnya berperan sebagai daerah resapan air

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Program

Komunikasi antar pelaksana program, Karakteristik Badan Pelaksana, Disposisi merupakan faktor pendorong implementasi program perbaikan drainase Kali Semarang. Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang memiliki tugas pokok dan fungsi secara jelas dalam Program Pengendalian Banjir

Komunikasi dan koordinasi antara stakeholder telah terjadi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya FGD antara Satker PPLP Provinsi Jawa Tengah, Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang dengan mengundang Bappeda Kota Semarang dan juga Walikota Kota Semarang. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Sistem Drainase Perkotaan yaitu penyelenggara wajib menyampaikan laporan kegiatan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan kepada pemerintah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang dan Satker PPLP Provinsi Jateng memiliki tugas pokok dan fungsi secara jelas dalam Program Pengendalian Banjir

Standar dan Sasaran, sumber daya manusia, faktor ekonomi masyarakat. SOP ataupun standar yang digunakan dalam implementasi program perbaikan Kali Semarang. Berdasarkan penelitian lapangan Dinas PSDA dan ESDM tidak mengetahui Standar Operasional

Prosedur (SOP) yang berlaku bagi seluruh pelaksana program. Dalam hal kemampuan, kapasitas dan kompetensi pelaksana program mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dimilikinya. Tanpa adanya kemampuan, kapasitas dan kompetensi pelaksana program suatu kebijakan tidak akan efektif karena pasti dilaksanakan tidak maksimal. Berhubungan dengan lingkungan ekonomi masyarakat Pada penelitian di lapangan, sebagian warga di wilayah Kali Semarang bagian utara berbeda dengan daerah tengah. Di bagian utara atau di Kecamatan Bandarharjo masyarakat masih dalam kondisi ekonomi tertinggal daripada di wilayah Semarang lainnya yang dilewati Kali Semarang.

B. SARAN

1. Implementasi Program Perbaikan Drainase Kali Semarang sebagai bagian dari Kebijakan Pengendalian Banjir Kota Semarang

Standar pelaksanaan tentu harus diketahui oleh pelaksana maupun penanggung jawab program. Program pengendalian banjir di Kota Semarang perlu adanya dukungan dari Dinas terkait mengenai pelaksanaan Perda Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 yang dapat mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan.

Pembinaan terhadap Badan pelaksana dan Walikota Semarang dalam penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang dilaksanakan oleh Menteri, meliputi koordinasi dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, pemberian norma, standar, prosedur dan kriteria Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

Peran masyarakat seharusnya mencakup peran aktif melaporkan adanya genangan, tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan drainase, peran serta masyarakat/swasta dalam operasi dan pemeliharaan sistem drainase.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Perbaikan Drainase Kali Semarang sebagai bagian dari Kebijakan Pengendalian Banjir Kota Semarang

Terkait faktor-faktor penghambat implementasi program, Standar pelaksanaan tentu harus diketahui oleh pelaksana maupun penanggung jawab program. Hal ini dikarenakan seluruh pekerja akan lebih mudah diawasi karena telah ada standar yang mengaturnya.

Perlunya evaluasi mengenai penempatan pegawai dan pelatihan terhadap seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan program.

Mengharuskan pemerintah untuk melaksanakan program

pemerintah yang dikhususkan kepada masyarakat yang rentan terhadap bencana yaitu PNPM-Daerah Tertinggal dan Khusus. Program ini diberikan pada daerah-daerah tertinggal dan yang mengalami konflik sosial dan bencana alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Islamy, Irfan. (2007). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kusumanegara, Solahuddin. (2010). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. (2006). *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang: Model-Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. (2008). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suwitri, Sri. (2008). *Jejaring Kebijakan dalam Perumusan Kebijakan Publik: Suatu Kajian tentang Kebijakan Penanggulangan Banjir dan Rob Pemerintah Kota Semarang*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Suwitri, Sri. (2009). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Wahab, Solichin Abdul. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara

Winarno, Budi. (2007). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

SUMBER REGULASI

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2010-2015

Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2013

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014

Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

SUMBER INTERNET

Anurogo, Dito (2009). Segala Sesuatu tentang Banjir di Kota Semarang. Dalam <http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com>. Diunduh pada 28 November 2014 pukul 15.00 WIB

Huzaini, Aidy. (2013). Tingkat Kekritisan Lahan di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Dalam <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/pwk>. Diunduh pada 2 Desember 2014 pukul 20.30 WIB

<http://psdaesdm.semarangkota.go.id/program-kegiatan/rencana-strategis-program-kerja> Diakses pada tanggal 25 November pukul 23.20 WIB
<http://geospasial.bnpb.go.id/category/peta-tematik/banjir/> Diunduh pada tanggal 24 November pukul 21.00